BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 125 / KPTS /III.16 /2020

TENTANG

PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT KEPADA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati;

b. bahwa dalam rangka menunjang Pelaksanaan tugas Lembaga Pemerintah lainnya, maka perlu diberikan Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang belum dimanfaatkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Pendamping Program Keluarga Harapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Program Keluarga Harapan (PKH) Lampung Barat;

KEDUA : Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dipinjamkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali;

KETIGA : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua selanjutnya akan dituangkan dalam surat perjanjian;

KEEMPAT : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Barat;
4. BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. PKH Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 125/KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 17 Jan · 2020

DAFTAR PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No	Nama Barang	Tipe/Warna	Nomor			Lembaga Penerima
			Rangka	Mesin	No Polisi/Th	
1.	HONDA BEAT	MERAH HITAM	MH1JM2120KK 314057	JM21E22 91477	BE 6454 MZ	Pendamping PKH Kec. Batu Ketulis
2.	HONDA BEAT	MERAH HITAM	MH1JM2128KK 508149	JM21E22 85553	BE 6455 MZ	Pendamping PKH kec. Batu Brak
3.	HONDA BEAT	MERAH HITAM	MH1JM2120KK 317766	JM21E22 96125	BE 6456 MZ	Pendamping PKH kec. Sukau
4.	HONDA BEAT	MERAH HITAM	MH1JBK312KK 283081	JBK3E128 1591	BE 6457 MZ	Pendamping PKH kec. Gedung Surian
5.	HONDA REVO X	HITAM	MH1JM2127KK 314072	JM21E22 91492	BE 6460 MZ	Pendamping PKH kec. Sekincau
6.	HONDA REVO X	HITAM	MH1JBK316KK 283021	JBK3E128 1743	BE 6459 MZ	Pendamping PKH kec. Suoh
7.	HONDA REVO X	HITAM	MH1JBK316KK 283083	JBK3E128 1653	BE 6453 MZ	Pendamping PKH kec. Pagar Dewa
8.	HONDA REVO X	HITAM	MH1JBK314KK 285625	JBK3E128 3811	BE 6458 MZ	Pendamping PKH kec. Balik Bukit

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS